

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELUARGA DI KOTA DEPOK

Muhammad Sahrul

Universitas Muhammadiyah Jakarta
aralbima367@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, sehingga seringkali digambarkan sebagai sebuah benang kusut yang sulit diurai permasalahannya, untuk mengentaskan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak, akan tetapi posisi sentralnya ada pada pemerintah. Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat harusnya bisa tepat sasaran dan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan baik. Penelitian ini mengenai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga Di Kota Depok. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang sangat bervariasi dalam hal pelaksanaannya, faktor yang mempengaruhinya adalah perencanaan program, kondisi dari sasaran program dan kondisi lapangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif serta *purposive sampling* dalam penentuan informan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pada konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kota Depok fokus utamanya adalah pembangunan fisik berupa fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan (Jalan, Fasilitas pendidikan, kesehatan dan saran – prasarana pemerintahan lainnya). Sedangkan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan keluarga dan kelompok masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang mengalami kesenjangan kehidupan secara sosial, ekonomi, dan keterbatasan mengakses sumber dan uapaya itu masih belum menjadi prioritas.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok, upaya itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok dengan adanya upaya pembinaan pelayanan sosial melalui pembentukan bina – bina dengan pemanfaatan posyandu terintegrasi, pemberian pembinaan, pelatihan secara rutin kepada masyarakat dan pengembangan UPPKS bagi keluarga Pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera 2, akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaan dan masih kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Upaya kemitraan dengan pihak lain yang potensial dalam mensejahterakan masyarakat masih minim dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Belum adanya satuan kerja kolektif yang komprehensif lintas sektor yang melibatkan *stakeholder* dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Berbasis, Keluarga

Latar Belakang Masalah

Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) bagi pemerintahan maupun *stakeholder*.

Pemerintah memang telah melaksanakan berbagai program. Program-program tersebut ada yang secara resmi dikelola pemerintah pusat yang dilanjutkan dengan bermacam-macam program pemberdayaan masyarakat. Dari sekian banyak pendekatan dan program yang ada di masyarakat nampaknya belum bisa secara optimal memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Karena program-program tersebut biasanya berbentuk proyek dan bersifat jangka pendek. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program tersebut tidak disertai dengan koordinasi yang memadai lintas stakeholder sehingga sering terjadi tumpang tindih antar program. Program-program tersebut meskipun seringkali mengklaim bersifat partisipatif, namun dalam kenyataannya masyarakat hanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tahapan akhir program. Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk mewujudkan visinya dengan dukungan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat (*stakeholders*). Misalnya, terkait pemberdayaan masyarakat apakah sudah dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka. Dalam perspektif pembangunan di Kota Depok, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat setempat berbasis masyarakat yang pada dasarnya merupakan penguatan potensi masyarakat (*community empowerment*) yang meletakkan masyarakat secara individu atau bersama-sama sebagai subjek pembangunan di daerah.

Di bagian lain tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok juga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, berdasarkan data hasil pendataan keluarga yang di lansir oleh BKKBN Pusat Tahun 2014 tentang jumlah dan persentase keluarga menurut tahapan Keluarga sejahtera di Kota Depok, dari 416.170 ribu kepala keluarga yang di lakukan pendataan, terdapat 7.117 (1,71%) Keluarag Pra Sejahtera, 57.679 (13,86%) Keluarga Sejahtera I, 165.809 (39,84 %) Keluarga Sejahtera II, 146.320 (35,16 %) Keluarga Sejahtera III, dan 39.245 (9,43%) Keluarga Sejahtera III +. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa masih banyak masyarakat yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kesejahteraan keluarga, dan perlu dilakukan berbagai upaya, dan strategi dalam mensejahterakan keluarga.

Permasalahan tersebut bukanlah satu-satunya persoalan yang harus di selesaikan oleh pemerintah kota depok, berdasarkan data yang ada sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok, bahwa permasalahan dari

aspek sosial kemasyarakatan di antaranya, Kematian bayi, Buta aksara, Penggunaan narkoba, penderita HIV/AIDS dan kasus perdagangan perempuan dan anak masih sangat rawan untuk terjadi di Kota Depok. Banyak faktor yang menyebabkan masalah – masalah tersebut sering terjadi di Kota Depok. Dari uraian di atas bahwa itu menunjukkan belum maksimalnya berbagai program-program pemberdayaan masyarakat yang ada dalam rangka memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran untuk keluar dari permasalahan kompleks yaitu kemiskinan dan permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya, masih belum terarahnya dengan baik berbagai macam program yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok, belum adanya sebuah komitmen yang integrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam rangka merealisasikan berbagai program yang sudah ada.

Selain beberapa persoalan yang diuraikan diatas, terdapat berbagai alasan pentingnya pemberdayaan keluarga sebagaimana di uraikan oleh Aida Vitalaya S. Hubeis yaitu : 1. Kedudukan keluarga dalam sistem sosial yang lebih luas, dimana keluarga sebagai sistem sosial terkecil mempengaruhi dan dipengaruhi sistem lainnya. 2. Fakta yang menunjukkan masih banyaknya keluarga yang hidupnya marjinal, miskin, tidak sejahtera. 3. Pada hakekatnya seluruh kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan individu, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan keluarga merupakan indikator keberhasilan seluruh kegiatan pembangunan. Upaya pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga akan senantiasa berlaku sepanjang masa mengingat perkembangan sosial ekonomi dan teknologi informasi yang akan terus maju. Oleh karena itu perlu kiranya digelorakkan lagi program pemberdayaan yang berbasis keluarga, meskipun sudah banyak lembaga – lembaga atau institusi yang menggalakkan program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga. Dengan menjadikan keluarga sebagai objek sekaligus sebagai subjek dalam memberdayakan masyarakat itu merupakan salah satu upaya yang sangat baik, sehingga masyarakat akan berpartisipasi dengan cara ambil bagian sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Guna memberdayakan masyarakat kearah yang lebih baik lagi, maka diperlukan upaya dan model pendekatan lain seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga. Namun, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga tersebut bisa menjadi strategi baru dalam memberdayakan masyarakat di Kota Depok. Dan apa kendala – kendala yang di hadapi pemerintahan Kota Depok dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kota Depok. Berkaitan dengan itu bentuk kontribusi nyata pemerintah dan dukungan berbagai pihak juga di butuhkan, terutama pihak – pihak yang secara langsung berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat berbasis

keluarga di Kota Depok dan mengetahui kendala – kendala yang di hadapi pemerintahan kota Depok dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengacu pada perumusan masalah di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Depok dan secara praktis penelitian ini menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi pemerintahan agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bisa di rasakan secara tepat oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Kajian Pustaka

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di kota Depok dengan melihat hasilnya dari implementasi beberapa program yang di arahkan untuk memberdayakan masyarakat dari berbagai bidang, berdasarkan hal itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah penelitian yang di lakukan oleh Hermansyah (2006) pelaksanaan program P3MK di Kelurahan Limo yang pada kenyataan di lapangan dapat diidentifikasi memiliki beberapa persoalan di antaranya : 1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Program belum sempurna; 2. Kurangnya sosialisasi program 3. Dana Rp 50 Juta masih dirasakan kurang oleh masyarakat jika semua komunitas RW melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan usulan mereka; 4. Tidak adanya pendampingan langsung di lapangan; 5. Belum bisanya semua sarana dan prasarana yang diusulkan komunitas RW dapat terlaksana; dan 6. Belum adanya data base mengenai masarakat miskin dan kurang mampu. Padahal kalau dilihat dan kita bisa cermati program – program yang di gulirkan ini merupakan program sangat bagus yang dalam pelaksanaan program P3MK tersebut menunjukkan adanya kekuatan di dalam program ini.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Erwin Permana (2010) yang membahas tentang program PNPM Mandiri di beberapa lokasi di kota Depok, dalam hasil penelitian yang berkaitan dengan realisasi program skala nasional yang mana setiap daerah mencanangkan program PNPM Mandiri termasuk Kota Depok. Hasil pengamatan di beberapa lokasi di daerah Kota Depok menunjukan bahwa masih terdapat perbedaan keberhasilan antara di lokasi yang satu dengan lokasi yang lain yang masih jauh dari prinsip prinsip pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang menekankan prinsip-prinsip diantaranya : bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlangsungan dan sederhana. Pada implementasi program di lapangan prinsip prinsip tersebut terlaksana lebih cenderung ke arah ekonomi dan perputaran ekonomi bergulir. Dan ini merupakan persolan tersendiri yang harus di selesaikan sehingga perlu di telusuri untuk perbaikan kedepan agar pemerataan pembangunan yang dicita-citakan dapat diwujudkan.

Kerangka Teoritik

I. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari – hari di Indonesia bersama – sama dengan istilah pengentasan kemiskinan sejak di gulirkannya program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa tertinggal (IDT). Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013 : 30), mendefinisikan Pemberdayaa masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut World Bank dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013 : 28). mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan – gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Senada dengan beberapa ahli di atas, Wrihatnolo (2007 : 279 – 280) membagi kedalam dua pengertian tentang pemberdayaan yaitu, pengertian pertama memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak – pihak lain atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian kedua adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. Berdaya yang dimaksud adalah memberi kekuatan atau tenaga agar tampil lebih mandiri. aktivitas yang terjadi dengan sendirinya atau berlangsung tanpa rencana.

Dari uraian beberapa pendapat ahli di atas, dapat dijelaskan pemberdayaan merupakan pendelegasian kewenangan kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi sasaran, agar bisa mengaktualisasikan kemampuannya sendiri dan pemberdayaan juga adalah suatu aktifitas yang direncanakan untuk memberikan kemampuan dan keberdayaan masyarakat.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas yang harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif namun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual.

Pemberdayaan masyarakat lebih didominasi pada pemberdayaan aspek sikap mental, oleh karena itu landasan utama strategi pemberdayaan masyarakat adalah strategi “memanusiakan manusia”. Konsep pemberdayaan mengandung dua variabel; yang diberdayakan “dan” yang memberdayakan ” Pihak “ yang memberdayakan” dapat

berasal dari luar sistem “yang diberdayakan” atau dari “yang diberdayakan” itu sendiri. Akan tetapi karena demikian lemahnya posisi “yang diberdayakan” sehingga ia memiliki kemampuan terbatas untuk memberdayakan diri, maka masalah ini lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat yang dipadukan oleh sistem di luar system kelompok sasaran.

Menurut Aida Vitayala S. Hubeis (2014 : 2 – 3) Strategi “memanusiakan manusia” sebagai dasar pemberdayaan masyarakat merupakan langkah awal dan paling penting sebelum mulai menjalankan serangkaian kegiatan memberdayakan masyarakat, pihak-pihak yang memberdayakan harus mengawali programnya dengan sudut pandang berikut :

- a) Kelompok sasaran / Poksar (“yang diberdayakan”) adalah manusia yang memiliki potensi diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- b) Jika poksar belum mampu menemukan potensi diri tersebut maka tugas “yang memberdayakan” adalah menumbuhkan dan memperlihatkan potensi tersebut pada poksar yang bersangkutan.
- c) Bantuan pihak luar dalam bentuk materi dan non materi dalam memberdayakan diri harus diposisikan hanya sebagai pelengkap.
- d) Motivasi atau semangat hidup sebagai manusia yang bermartabat yang harus menjalankan perannya secara profesional, apapun bentuk peranan tersebut harus digali dan ditumbuhkan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, untuk sebuah keberhasilan, maka strategi itu diperlukan sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat diranah yang praktis. Sebagaimana yang diuraikan oleh ahli diatas bahwa dalam strategi pemberdayaan masyarakat, yang diutamakan adalah memanusiakan manusia. Dalam konteks ini penulis sependapat dengan ahli tersebut di atas karena itu merupakan hal yang mendasar yang harus dilakukan sehingga masyarakat merasa di hormati, dihargai, dan diperhatikan dengan baik, kemudian masyarakat akan secara sukarela melakukan berbagai aktifitas atau mendukung program – program yang ada dengan mengambil bagian didalamnya sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek akan tetapi sebagai subjek dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Pengembangan Masyarakat

Pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses bertahap yang menguatkan sendi-sendi masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya. Tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat berbanding lurus dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat dengan mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.

Pengembangan masyarakat di indonesia dibagi dalam dua aspek Adi Fahrudin (2007 : 30). Pertama adalah pengembangan masyarakat dalam aspek sempit yaitu pengembangan masyarakat adalah sebagai intervensi sosial yang bersifat partisipatif. Aspek kedua yang lebih luas mencakup varian jenis metode intervensi sosial antara lain *community development, community care, community education, community planning,*

community services. Sejalan dengan itu menurut AMA dalam Edi Suharto (2005 : 38) Pengembangan dapat di definisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses – proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Secara teoritis pengembangan masyarakat menurut Twelvetrees dalam Edi Suharto (2005 : 40) dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis – marxis) dan aliran kanan (kapitalis – demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Keluarga

Menurut (UU No. 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan nasional memandang penting keluarga sebagai unit analisis maupun fokus pemberdayaan. Peran keluarga yang strategis membuat keluarga laksana sang primadona yang diperebutkan oleh banyak kalangan. Keluarga memiliki makna sentral dalam sebuah realitas sosial. Hampir semua disiplin ilmu memandang keluarga sebagai entitas terkecil yang sangat focal.

Banyaknya pihak yang memperhatikan keluarga sebagai tema pemberdayaan, sebenarnya merupakan hal positif jika dibarengi dengan adanya koordinasi lintas profesional dan sektoral. Sebaliknya tanpa sinergitas dan kerja sama antar lintas kalangan, situasi ini dapat mengarah pada pemborosan sumber daya, berlebihan dan tumpang tindih program, kejenuhan sasaran dan bahkan *system abuse* yang pada gilirannya dapat menjauhkan pencapaian tujuan pemberdayaan. Dalam konteks ini, aliansi antar lintas kalangan merupakan sebuah keniscayaan. Aliansi layak dikedepankan sebagai isu strategis pemberdayaan keluarga. Dalam wacana pemberdayaan keluarga, ada tiga tugas utama yang dapat dilakukan oleh sebuah aliansi menurut Edi suharto (172 : 2005) sebagai berikut :

- a) Menganalisis isu – isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan dan peran keluarga dalam konteks global dan nasional. Isu – isu strategis ini secara berkala dianalisis dan kemudian ditetapkan satu isu yang akan dijadikan rencana aksi.
- b) Merumuskan grand design dan grand strategi program – program pemberdayaan keluarga. Parameter yang dapat di gunakan dalam membaut desain dan strategi besar program dapat mengacu pada prinsip smart (*Specific, measurable, achievable, realistic, time – bound*).
- c) Melakukan advokasi terhadap kebijakan – kebijakan public tingkat makro. Advokasi dapat di lakukan baik terhadap kebijakan yang dianggap menunjang maupun menghambat proses pemberdayaan keluarga.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Creswell dalam J.R. Raco (2010 : 7), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Sedangkan metode deskriptif menurut Lexi J. Moleong (2010 : 11) menjelaskan tipe deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan–kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan : Observasi : Observasi di lakukan untuk pengamatan langsung maupun tidak langsung dan melihat dengan cermat objek yang akan diteliti, mencatat hal yang nyata dan diperlukan dalam pengumpulan data secara langsung. Wawancara Mendalam Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Adapun informan yang di wawancarai adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMK, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial BPMK, Sekertaris PKK Depok, Kabid Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA. Studi Dokumentasi : Berupa data dokumen publik yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti Koran, makalah, laporan penelitian) atau dokumen privat (seperti buku harian, diary, video, atau segala jenis surat, email), serta foto – foto kegiatan dalam melakukan penelitian, pencarian dan pengumpulan data. Studi Kepustakaan Sebuah penelitian takkan lepas dari sebuah studi kepustakaan, pendekatan metode yang dipakai adalah analisis isi (*content analysis*). Content analysis adalah sebuah teknik analisis yang mengkaji berbagai sumber informasi yang ada termasuk bahan cetak untuk mendapatkan konsep – konsep ilmiah dan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, (2005 : 98) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan melakukan analisa data. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berkaitan dengan hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa di pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi keluarga sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program – program yang ada lebih khusus pemberdayaan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama.

Tahapan – tahapan dalam proses itu mulai dilakukan dengan pemetaan situasi dan kondisi masyarakat (perencanaan dalam skala kecil) baru kemudian dilanjutkan pada tingkatan perencanaan secara makro (skala besar) yang melibatkan semua pihak yang berkaitan satu sama lain. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Kota Depok adapun fokusnya adalah pembangunan fisik dan tata ruang daerah serta sarana dan prasarana pemerintah, pada sisi yang lain juga bahwa difokuskan kepada program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, karena di wilayah Kota Depok masih terdapatnya kantong – kantong atau wilayah yang secara kehidupan sosial, ekonomi serta akses sumber masih terdapat kesenjangan dengan wilayah – wilayah lain dan harus menjadi perhatian serius pemerintah dengan melakukan berbagai cara (strategi yang lebih baik dan terarah serta tepat sasaran), agar tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dan secara langsung bisa dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat.

Dengan masih terdapatnya kesenjangan yang terjadi di wilayah Kota Depok kemudian di kaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat karena satu wilayah dengan wilayah lain terdapat perbedaan – perbedaan yang mestinya menjadi pertimbangan penting dalam melakukan intervensi dan pendekatan yang dilakukan karena tidak semua daerah atau wilayah bisa diterapkan model yang sama.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada dua fokus utama pemerintah Kota Depok dalam pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah : Pertama, secara khusus kepada wilayah – wilayah yang masyarakatnya masih terdapat kesenjangan secara sosial, ekonomi serta akses sumber. Kedua, masyarakat yang secara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang baik dan kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik pula akan tetapi fokusnya adalah membantu memenuhi upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan layak bagi masyarakatnya, karena ini sudah menjadi indikator kehidupan masyarakat perkotaan pada umumnya.

Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah Kota Depok memiliki tahap – tahap yang di lakukan. Dari segi perencanaan dikenal dengan istilah Bottom Up (melalui program Musyawarah Rencana Pembangunan) MUSRENBANG, dengan pelibatan masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkat kota untuk memberikan usulan – usulan program yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi tahapan – tahapan dalam perencanaan program/kegiatan yang dilakukan sudah ada pembatasan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), artinya secara garis besar aktifitas pembangunan dari berbagai bidang sudah ada dalam RPJMD termasuk langkah dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan program – program yang akan di laksanakan sehingga apapun yang menjadi usulan dari berbagai unsur termasuk kalangan masyarakat bawah tidak kemudian bisa diserap secara utuh karena secara prinsip dalam rencana pembangunan tidak boleh keluar dari RPJMD tersebut.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pola – pola seperti itu cenderung kurang partisipatif dan akomodatif karena seharusnya apa yang menjadi keputusan dan perencanaan yang dilakukan oleh para pimpinan puncak masyarakat dan sebagai sarana

bersama maka berhak untuk mengetahui dan pemerintah harus mensosialisasikan itu secara massif kepada masyarakat, dan model – model seperti itu yang dikatakan Bottom Up sudah betul akan tetapi dalam implementasinya kurang akomodatif, sehingga dapat dikatakan bahwa itu tidak bersifat Bottom Up secara utuh. Karena satu sisi mengakomodir usulan dan masukan masyarakat hanya melalui sarana MUSRENBANG saja, dan pada tahap implementasi program tidak akomodatif dan cenderung tidak efektif dalam memenuhi tepat sasaran.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil di lapangan bahwa Pemerintah Kota Depok fokusnya adalah pemberdayaan kelompok usaha kecil menengah, memberikan bantuan rumah tidak layak huni dan pemberdayaan pemuda serta bantuan operasional kepada RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan dengan harapan bahwa dengan di realisasikan program tersebut adalah terjadi aktualisasi kemampuan untuk adanya perubahan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain program – program di atas, berdasarkan hasil observasi ada beberapa program rutin yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara langsung yaitu penerapan teknologi tepat guna, bulan bakti gotong royong masyarakat, tentara manunggal masuk desa. Kegiatan rutin ini digunakan untuk melakukan sosialisasi program pemerintahan dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat serta untuk menyaring informasi dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program dan jalannya pemerintahan Kota Depok. Pemberdayaan Masyarakat menurut Wrihatnolo (2007 : 279 – 280) membagi kedalam dua pengertian tentang pemberdayaan yaitu, pengertian pertama memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak – pihak lain atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian kedua adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. Berdaya yang dimaksud adalah memberi kekuatan atau tenaga agar tampil lebih mandiri. aktivitas yang terjadi dengan sendirinya atau berlangsung tanpa rencana.

Uraian di atas dan dikaitkan secara teoritis, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dengan mengoptimalkan sistem sumber yang ada bisa dikatakan bahwa upaya itu dilaksanakan, akan tetapi esensi dari pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang di kemukakan oleh Ahli tersebut belum diterapkan secara baik dan juga masih jauh dari keinginan masyarakat khususnya masyarakat yang memerlukan intervensi dan pendekatan yang komprehensif masih belum dilakukan di Pemerintahan Kota Depok.

Bisa di lihat bahwasannya belum ada pemberian kewenangan atau kemitraan dengan pihak lain maupun masyarakat itu sendiri dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat tersebut,serta secara prinsip, indikator dan proses dalam pemberdayaan masyarakat belum maksimal, sehingga harapan keberdayaan masyarakat masih sangat kurang dirasakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas pada pelibatan dalam kegiatan – kegiatan ataupun program yang bersifatnya tidak secara komprehensif dirasakan oleh masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat secara internal pemerintahan Kota Depok dilakukan dengan

melibatkan beberapa institusi mulai dari tahap perencanaan, dan implementasi program. Yang menjadi leading sector dalam Pemberdayaan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga (BPMK) sedangkan pelibatan institusi lain hanya bersifat koordinasi program, serta ada institusi yang secara teknis melaksanakannya di lapangan yaitu PKK. Dari dua lembaga tersebut secara alur koordinasi sangat jelas karena PKK dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga secara langsung.

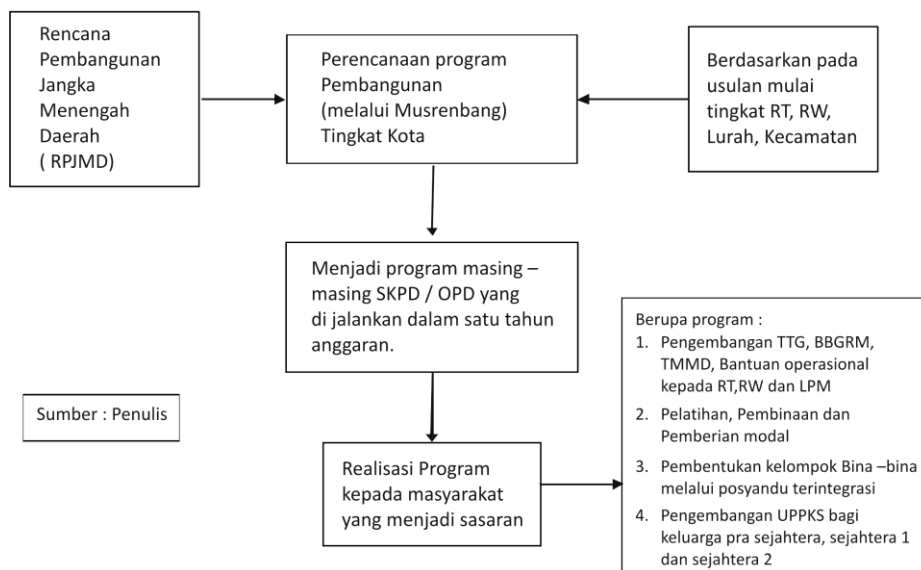
Secara Institusi PKK merupakan tim yang fokus pada pemberdayaan keluarga dengan kekuatan sumber daya manusia yang banyak dan merata di berbagai wilayah dan tingkatan dan menjadi modal dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan pemerintahan. Selain itu juga dengan instansi – instansi lain PKK sebagai ujung tombak dalam melakukan pemberdayaan dan perwujudan kesejahteraan keluarga hanya menjadi mitra partisipatif dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh masing – masing instansi tersebut tentu yang ada kaitannya dengan pemberdayaan keluarga.

Melalui tim PKK dan pemanfaatna kader – kader posyandu tersebutlah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan keluarga. Karena kedua kelompok tersebut berada dan turun langsung ke kelompok masyarakat dan keluarga yang secara kehidupan sosial, ekonomi dan akses sumber memerlukan bantuan atau pendampingan. Adapun upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan dengan membentuk kelompok – kelompok kegiatan dengan memberikan program pelatihan, pembinaan rutin secara langsung, dan pemberian modal bergulir dan pelaksanaannya dilakukan oleh kader posyandu dan PKK dengan dibawah koordinasi BPMK sebagai leading sector. Pada bagian lain bahwa pelayanan sosial kepada masyarakat dilakukan melalui kelompok bina – bina yang dikelompokkan dalam bentuk usia dan berdasarkan kebutuhan baik itu sosial, ekonomi dan bidang lainnya. Dalam kerangka implementasi program –program tersebut pada tahap realisasinya bergantung pada penganggaran dana yang di alokasikan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa dari berbagai macam program / kegiatan tersebut dapat dikatakan bahwa belum secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pada tataran implementasi program masih belum secara utuh tepat sasaran.

Berdasarkan uraian bagian analisis tersebut di atas, dapat di gambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga di Kota Depok sebagai berikut :

Gambaran Alur Program Pemberdayaan Masyarakat



Dari gambar tersebut di atas, dalam pemberdayaan masyarakat Kota Depok belum ada satuan kelompok kerja yang kolektif dan komprehensif, karena dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan juga ranah atau objek yang menjadi pemberdayaan tidak hanya sebatas ada pemberdayaan ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat, atau hanya sekedar kegiatan yang rutinitas dan tidak menyentuh esensi dari pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa langkah dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Aida Vitalaya S. Hubeis sebagai berikut :

- a) Kelompok sasaran / Poksar (“yang diberdayakan”) adalah manusia yang memiliki potensi diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- b) Jika poksar belum mampu menemukan potensi diri tersebut maka tugas “yang memberdayakan” adalah menumbuhkan dan memperlihatkan potensi tersebut pada poksar yang bersangkutan.
- c) Bantuan pihak luar dalam bentuk materi dan non materi dalam memberdayakan diri harus diposisikan hanya sebagai pelengkap.
- d) Motivasi atau semangat hidup sebagai manusia yang bermartabat yang harus menjalankan perannya secara profesional, apapun bentuk peranan tersebut harus digali dan ditumbuhkan.

Keluarga sebagai objek dari pemberdayaan masyarakat harusnya bisa menjadi alternatif sebagai motor penggerak dalam hal ini selain pelibatan masyarakat secara langsung sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan itu sendiri, juga harus ada sikap kolektif antara pemangku kepentingan untuk bersama – sama dalam pengentasan kemiskinan, pengentasan masalah – masalah social kemasyarakatan lainnya perlu adanya sebuah aliansi atau perkumpulan untuk bersama – sama dengan pemerintah sebagaimana yang disebut oleh Edi Suharto sebagai berikut : Banyaknya pihak yang memperhatikan keluarga sebagai tema pemberdayaan, sebenarnya merupakan hal positif jika dibarengi dengan adanya koordinasi lintas profesional dan sektoral.

Sebaliknya tanpa sinergitas dan kerja sama antar lintas kalangan, situasi ini dapat mengarah pada pemborosan sumber daya, berlebihan dan tumpang tindih program, kejenuhan sasaran dan bahkan system abuse yang pada gilirannya dapat menjauhkan pencapaian tujuan pemberdayaan.

Dalam konteks ini, aliansi antar lintas kalangan merupakan sebuah keniscayaan. Aliansi layak dikedepankan sebagai isu strategis pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Dalam wacana pemberdayaan berbasis keluarga, ada tiga tugas utama yang dapat dilakukan oleh sebuah aliansi menurut Edi Suharto (2005 : 172) sebagai berikut :

- a. Menganalisis isu – isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan dan peran keluarga dalam konteks global dan nasional. Isu – isu strategis ini secara berkala dianalisis dan kemudian ditetapkan satu isu yang akan dijadikan rencana aksi.
- b. Merumuskan grand design dan grand strategi program – program pemberdayaan keluarga. Parameter yang dapat di gunakan dalam membuat desain dan strategi besar program dapat mengacu pada prinsip smart (Specific, measurable, achievable, realistic, time – bound).
- c. Melakukan advokasi terhadap kebijakan – kebijakan public tingkat makro. Advokasi dapat di lakukan baik terhadap kebijakan yang dianggap menunjang maupun menghambat proses pemberdayaan keluarga.

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa sangat penting pelibatan berbagai pihak yang secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan bahwa belum ada Aliansi atau kelompok – kelompok yang dimana berbagai pihak menjadi satu kesatuan dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Baru sebatas kelompok – kelompok kerja yang melibatkan antar institusi secara internal saja dan itupun ada ketika penyamaan program pada tingkat perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing – masing instansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas dan penelitian lapangan yang telah di jabarkan pada empat bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pada konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kota Depok fokus utamanya adalah pembangunan fisik berupa fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan (Jalan, Fasilitas pendidikan, kesehatan dan saran – prasarana pemerintahan lainnya). Sedangkan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan keluarga dan kelompok masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang mengalami kesenjangan kehidupan secara sosial, ekonomi, dan keterbatasan mengakses sumber dan upaya itu masih belum menjadi prioritas.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok, upaya itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok dengan adanya upaya pembinaan pelayanan sosial melalui pembentukan bina – bina dengan pemanfaatan posyandu terintegrasi, pemberian pembinaan, pelatihan secara rutin kepada masyarakat dan pengembangan UPPKS bagi keluarga Pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera 2, akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaan dan masih kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Upaya kemitraan dengan pihak lain yang potensial dalam mensejahterakan masyarakat masih minim dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Belum adanya satuan kerja kolektif yang komprehensif lintas sektor yang melibatkan stakeholder dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. "Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- _____. 2002. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI
- _____. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Jakarta : FISIP UI Press
- Nurdin, Fadhil. 1989. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial. Bandung : Angkasa
- Wrihatnolo, Randy. R. dkk. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : PT. gramedia
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Rafika Aditama
- Lexy J.Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya
- _____. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya
- _____. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya
- Irmayani. 2009. Keluarga Berketahanan Sosial. Jakarta : P3KS Press
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : Rafika Aditama
- Raco.J.R. 2010. Metode penelitian kualitatif. Jakarta : PT. Grasindo
- Danim, Sudarwan. 2003. Riset Keperawatan " sejarah dan metodologi ". Jakarta : Buku Kedokteran EGC
- Black. James, dkk. 2001. Metode dan masalah penelitian sosial. Bandung : Rafika Aditama
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Jhon, W. Creswell. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Edisi ke 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mardikanto, Totok,dkk. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Depok : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar Ruzz Media

Undang-Undang :

- a. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Prosiding, Jurnal dan Makalah/Paper :

1. Partini, 2013. CSR and Community Development (Implementation Studies of CSR in PTBA in Muara Enim, South Sumatra Province), Journal of People And Environment, Volume 20, Nomor 1, Maret 2013.
2. Makalah/Paper Cholisin Staf Pengajar Fis Uny “Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011
3. Makalah/Paper Juneri “Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan “
4. Makalah/Paper Dr. Ir. Hj. Aida Vitayala S. Hubeis “Pembangunan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat”
5. Abstraksi Hasil Penelitian Tesis Hermansyah Pascasarjana UI “Pemberdayaan Masyarakat Sub-Urban: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program P3MK Di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok
6. Buku Saku Panduan Kader PKK Kota Depok
7. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2016

Website :

<http://id.wikipedia.org> (Diakses pada : Tgl 7 februari 2015)